



# PERAN DIPLOMASI PERTAHANAN TERHADAP KERJASAMA BISNIS INTERNASIONAL DI BIDANG INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA

*(THE ROLE OF DEFENSE DIPLOMACY IN INTERNATIONAL BUSINESS  
COOPERATION IN THE FIELD OF THE INDONESIAN DEFENSE INDUSTRY)*

**Afri Emilia Br Sembiring, Renaldo Fajar Nugraha Susilo**

Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan  
Fakultas Bisnis & Teknologi, Institut Desain dan Bisnis Bali

Email: afriemilia.s@gmail.com, susilorenaldo1@gmail.com

## **Abstract**

*This article discusses the important role of defense diplomacy in initiating and strengthening international business cooperation in the Indonesia defense industry sector. Defense diplomacy has become the basis of strategy in establishing a mutually beneficial framework in the defense sector. Through the study of literacy techniques, this article explores various aspects, including policy, economics, and technological cooperation, which all contribute to the development of the defense industry. The research results show that defense diplomacy has a role in developing the defense industry and can be a driving force for expanding the reach of international business in the context of Indonesia defense industry. Through defense diplomacy, countries will assess threats to national interests and see the need for the strong defense industry.*

**Keywords:** *Defense diplomacy, international business, defense industry*

## **Abstrak**

Artikel ini membahas peran penting diplomasi pertahanan dalam menggagas dan memperkuat kerjasama bisnis internasional di sektor industri pertahanan Indonesia. Diplomasi pertahanan menjadi landasan strategis dalam membentuk kerangka kerja yang saling menguntungkan di bidang pertahanan. Melalui teknik studi literasi, artikel ini menggali berbagai aspek, termasuk kebijakan, ekonomi, dan kerjasama teknologi, yang semuanya berkontribusi pada pengembangan industri pertahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan memiliki peran dalam mengembangkan industri pertahanan serta dapat menjadi pendorong untuk memperluas jangkauan bisnis internasional dalam konteks industri pertahanan Indonesia. Melalui diplomasi pertahanan, negara akan menilai ancaman terhadap kepentingan nasional dan melihat perlunya industri pertahanan yang kuat.

**Kata kunci:** Diplomasi pertahanan, kerjasama internasional, industri pertahanan



## 1. Pendahuluan

Membahas mengenai pertahanan kini tidak hanya sekadar tentang militer. Pertahanan bersifat multidimensi, berkaitan dengan berbagai sektor. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dijelaskan bahwa tujuan dari pertahanan negara adalah untuk melindungi tiga aspek dari potensi ancaman dan gangguan, yaitu menjaga kedaulatan negara, mempertahankan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjamin keselamatan seluruh rakyat. Pola ancaman pada pertahanan yang semula hanya tentang perang, militer, kini lebih luas mencakup ancaman nonmiliter.

Indonesia memiliki banyak sumber daya alam dan memiliki wilayah yang luas, menjadikan alasan bagaimana pertahanan Indonesia sangat rentan dan penting untuk berdikari. Dengan luas wilayah laut sebesar 3,25 juta km<sup>2</sup>, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Itu berada di antara dua samudra, Pasifik dan Hindia, dan dilewati oleh banyak jalur pelayaran, seperti Selat Malaka dan Laut Sulawesi. Potensi ini pun tidak disia-siakan oleh Pemerintahan Indonesia pada era Presiden Joko Widodo melalui visinya yaitu Poros Maritim Dunia (Samy & Kusumadewi, 2021). Indonesia memiliki potensi yang besar baik dalam maupun luar negeri, bila potensi yang dimiliki tidak dikelola dengan baik, dengan sistem pertahanan yang baik, maka tidak dapat dipungkiri bahwa potensi tersebut dapat beralih menjadi ancaman.

Indonesia menggunakan diplomasi pertahanan untuk menangani berbagai ancaman. Hal ini menjadi menarik bagaimana secara tradisional kata diplomasi, berkaitan dengan kerjasama, digabungkan dengan pertahanan, yang dipahami berkaitan erat dengan militer. Dalam mencapai tujuan pertahanan negara seperti disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 sebelumnya, pertahanan yang kuat adalah jawabannya. Satu hal lain yang sangat penting adalah penguatan industri pertahanan Indonesia dan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista). Di sisi lain, industri pertahanan memerlukan anggaran yang besar serta teknologi yang tinggi. Meskipun demikian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kerap menyampaikan bahwa *defense is not a cost, but is an investment*. Berdasarkan *The Asia Power Index 2023* yang



dirilis *Lowy Institute*, Indonesia berada di urutan ke-10, sedangkan dalam hal kemampuan militer, Indonesia berada di urutan ketiga belas, dengan Amerika Serikat sebagai negara *super power* di urutan ke-1 (PATTON et al., 2023). Hal ini kemudian menjadi penanda bahwa Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara maju lainnya dan pemantik bahwa Indonesia masih perlu memperkuat industri pertahanannya dalam mencapai kemandirian alutsista.

Dalam bisnis alutsista, merujuk pada Heidenkamp, dkk 2013, terdapat tiga macam peran negara, yaitu sebagai customer, sponsor, dan regulator (Heidenkamp et al., 2013). Disisi lain, menurut Iis Gindarsah 2016, terdapat tiga tiga sasaran strategis dari diplomasi pertahanan Indonesia yaitu membangun kepercayaan, mengembangkan kapabilitas militer, dan membangun basis industri pertahanan strategis (Iis Gindarsah, 2016). Dengan demikian, beberapa pertanyaan yang dimaksudkan untuk dijawab dalam penelitian ini antara lain terkait peran diplomasi pertahanan dalam memengaruhi kebijakan kerjasama bisnis internasional dalam industri pertahanan (kerjasama teknologi, penelitian, perundingan pertahanan bilateral, ekspor-impor peralatan militer, stabilitas dan keamanan global), tantangan yang mungkin dihadapi, serta pola khusus diplomasi pertahanan terhadap kerjasama bisnis internasional dalam beberapa dekade terakhir.

Penelitian ini juga ingin membahas bagaimana fungsi lembaga internasional dan organisasi regional dalam memfasilitasi kerjasama bisnis di industri pertahanan dan mengidentifikasi efektivitas diplomasi pertahanan dalam mendorong kerjasama bisnis internasional dibanding diplomasi konvensional. Diharapkan penelitian ini akan menjadi referensi bagi para peneliti dan akademisi terkait peran diplomasi pertahanan dalam membangun kerjasama bisnis internasional dalam industri pertahanan, maupun bagi para pihak yang terlibat langsung dalam diplomasi pertahanan dan kerjasama bisnis internasional sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.



## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Diplomasi Pertahanan dan Industri Pertahanan

Menurut Erik Pajtinka 2017, diplomasi pertahanan adalah serangkaian tindakan non-tempur yang dilakukan oleh pasukan sipil dan militer Kementerian Pertahanan dengan tujuan mencapai tujuan kebijakan di luar negeri. Ini merupakan bagian dari diplomasi negara secara keseluruhan (Pajtinka, 2017). Selain itu, dalam diplomasi pertahanan, angkatan bersenjata digunakan sebagai alat kebijakan luar negeri untuk melakukan diplomasi negara.(Muthanna, 2011). Kedua definisi yang disampaikan masing-masing menyebutkan kebijakan luar negeri, namun juga terdapat kata militer serta senjata. Diplomasi pertahanan telah menempatkan pertahanan sebagai alat atau kendaraan dalam mencapai tujuan politik luar negeri. Salah satu arah kebijakan luar negeri negara Indonesia adalah membangun dan memelihara perdamaian dunia. Bagaimana sistem senjata, industri pertahanan, cocok untuk dunia yang damai? Inovasi teknologi peperangan mungkin dapat digunakan sebagai cara baru dalam “berperang”.

Diplomasi pertahanan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya pertahanan tanpa kekerasan untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri dan/atau pertahanan nasional yang termasuk dalam diplomasi nasional secara keseluruhan. Peran krusial industri pertahanan dalam menjalankan fungsi pertahanan negara sangat signifikan. Industri ini bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan Alat Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) untuk mendukung sistem pertahanan nasional, sambil diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, peran industri pertahanan tidak hanya terbatas pada aspek pertahanan semata, melainkan juga memiliki dampak positif pada berbagai dimensi, termasuk pembangunan ekonomi. Industri pertahanan dalam negeri menjadi elemen kunci dalam upaya meningkatkan kemandirian sektor pertahanan.

Disamping itu, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menjelaskan bahwa Industri Pertahanan adalah industri nasional, yang terdiri dari badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta, baik individu maupun kelompok, yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya



menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan serta jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika ingin memiliki kemandirian dalam menghasilkan alaphankam, Indonesia harus dapat memainkan peran sebagai regulator untuk memproteksi industri pertahanan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, termasuk dalam bisnis internasional.

## 2.2. Kerjasama Bisnis Internasional

Kerjasama bisnis internasional dapat diartikan sebagai "... kolaborasi antar perusahaan, ... antara dua atau lebih mitra dari negara berbeda, ... yang tetap independen dalam segala bidang yang tidak tunduk pada kolaborasi, ... untuk realisasi bersama atas tugas-tugas tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang berkolaborasi saja" (Holtbrügge, D., 2004). Menurut *Global Cooperation Barometer 2024*, ada lima pilar kerja sama global yang memengaruhi kemajuan dunia dan bergantung pada kerja sama ekonomi dan antar negara, yakni; perdagangan dan modal, inovasi dan teknologi, iklim dan modal alam, kesehatan dan kesejahteraan, serta perdamaian dan keamanan (Schulman, M. (Ed.), 2024). Aspek-aspek ini tentunya membuka peluang bagi semua negara termasuk Indonesia untuk melakukan kerjasama di tingkat internasional dalam memenuhi kebutuhan negara dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi terjadinya kerjasama bisnis internasional, beberapa di antaranya adalah dapat dijabarkan dalam Tabel 1 berikut.

**Tabel 1**  
**Faktor yang Memengaruhi Terjadinya Kerjasama Bisnis Internasional**

<b>Faktor Kunci</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Implementasi</b>
Kepercayaan	Kompetensi organisasi dan keadaan psikologis individu sangat berpengaruh dalam menerjemahkan hasil dalam hubungan antar organisasi	BMW Group, Audi, dan Porsche menyatukan sumber daya mereka untuk membangun 400 unit pengisian daya kendaraan elektrik



	(Chrupala-Pniak, M., Grabowski, D., & Sulimowska-Formowicz, M., 2017).	di Eropa hingga tahun 2020 (BMW Group, 2017).
Kesamaan Nilai ( <i>common value</i> )	Kesepahaman didapat setelah mitra mengidentifikasi perbedaan satu sama lain yang dapat meningkatkan kinerja aliansi (Krishnan, R., & Auklah, P. S., 2022).	BRICS dibentuk atas dasar prediksi negara BRIC akan mendominasi ekonomi global, namun memiliki tantangan yaitu perbedaan kepentingan yang ingin dicapai (Priangani, A, 2015)
Stabilitas	Adanya kerjasama bisnis internasional dapat menjadi instrumen stabilitas dan pengembangan ekonomi yang signifikan (Solovev, D. B., Reshetnikova, N. N., & Magomedov, M. G., 2020).	Dengan membuka diri terhadap pasar bebas dan menciptakan instrumen kebijakan yang efektif, Cina (Tian, W., & Yu, M., 2022; Jiahe, C., 2022) dan Singapura (Kwan, C. H., 2023) mampu mendapatkan likuiditas finansial, koneksi bisnis dan perkembangan teknologi untuk mempercepat pertumbuhan.
Regulasi	Peran mediator dalam menciptakan kemudahan berusaha ( <i>ease of doing bisnis</i> ) dengan mitra dari negara lain merupakan elemen penting dalam meningkatkan inovasi dan daya saing suatu negara (Morano, R. S., Jacomossi, R. R.,	Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan firma hukum dengan jaringan global seperti Assegaf Hamzah & Partners berperan penting sebagai mediator maupun dalam memberikan nasihat terkait pemahaman regulasi, fasilitas

	Barrichello, A., & Feldmann, P. R., 2023).	dialog, maupun informasi mengenai pengetahuan bisnis, jaringan, dan koneksi yang ada di Indonesia (KADIN, 2024; Assegaf Hamzah & Partners, 2023)
Keunggulan Komparatif	Kondisi suatu negara yang memiliki kemampuan untuk menyediakan produk/jasa tertentu yang lebih besar daripada negara lain (Gumilar, A., 2018).	Banyak merek-merek perusahaan besar di Amerika Serikat berinvestasi dan memiliki pabrik di Asia Tenggara termasuk Indonesia untuk melakukan ekspansi pasar dan tersedianya sumber daya alam dan manusia yang melimpah (Kotler, P., Kartajaya, H., & Huan, H. D., 2015; Wistiasari, D., & Safitri, Y. A., 2023; Vistra, 2022)

### 2.3. Kompleks Militer-Industri

Menurut Ensiklopedia Britannica, kompleks militer-industri (*military-industrial complex*) adalah jaringan orang dan organisasi yang membuat senjata dan teknologi militer. Istilah ini digunakan pertama kali oleh Presiden AS. Dwight D. Eisenhower dalam Pidato Perpisahannya pada 17 Januari 1961 (Weber, R. N., 2023).

Indonesia telah memiliki komite untuk mengoordinasikan kebijakan nasional terkait Industri Pertahanan, yakni Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) (KKIP, 2018a). Komite ini juga dibutuhkan untuk membangun industri pertahanan yang kuat, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional (Kemhan RI, 2022). Hal ini juga sempat disampaikan oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto bahwa pertahanan adalah investasi bagi suatu negara, yang menjamin iklim perekonomian yang baik



(Santosa, B., 2020) dan menjaga kekayaan agar Indonesia menjadi negara yang sejahtera (Bhwana, P. G. (Ed.), 2024).

Adanya kompleks militer-industri di Indonesia membuka berbagai peluang kerjasama bisnis internasional di bidang industri pertahanan. Dilansir dari situs KKIP, diidentifikasi bahwa terdapat 8 BUMN dan 34 BUMS yang bergerak dalam industri pertahanan Indonesia (KKIP, 2018b). Industri pertahanan Indonesia juga diharapkan memasuki peringkat 50 besar dunia, menyusul industri pertahanan dari Amerika Serikat seperti *Lockheed Martin*, *Raytheon Technologies*, dan *Boeing* (Kemhan RI, 2022b; Hidranto, F, 2022).

### **3. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik studi literasi. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari berbagai sumber, antara lain jurnal ilmiah, situs web, dan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan diplomasi pertahanan, kerja sama bisnis internasional, dan industri pertahanan.

### **4. Hasil dan Diskusi**

#### **4.1. Peran Diplomasi Pertahanan dalam Memengaruhi Kebijakan Kerjasama Bisnis Internasional dalam Industri Pertahanan**

##### **4.1.1. Kerjasama Teknologi, Penelitian dan Pengembangan**

Dalam upaya pengembangan industri pertahanan, diplomasi pertahanan dapat menjadi wadah untuk menjalin kerjasama strategis, mentransfer teknologi, dan melakukan investasi dalam sektor pertahanan. Dalam konteks ini, diplomasi pertahanan bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas, memperkuat independensi, dan meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan industri pertahanan (Syawfi, 2009). Penggunaan diplomasi pertahanan dalam konteks industri pertahanan menjadi relevan karena negara-negara perlu mengatasi tantangan peralatan militer yang sudah tua serta menghindari dampak dari embargo dan sanksi militer yang sering kali diberlakukan oleh negara maju kepada negara



berkembang. Semua itu dilakukan sebagai bagian dari kerjasama dalam teknologi pertahanan.

Pembangunan kapasitas dikenal juga dengan *capacity building*, didefinisikan sebagai proses mengembangkan dan memperkuat keterampilan, naluri, kemampuan, proses, dan sumber daya yang diperlukan oleh organisasi dan komunitas untuk bertahan hidup, beradaptasi, dan berkembang di dunia yang berubah dengan cepat. Pembangunan kapasitas adalah proses strategis dan terarah yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas suatu entitas untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dalam hal ini, kaitannya dengan bidang pertahanan dan militer, pembangunan kapasitas mengacu pada pengembangan dan peningkatan kemampuan militer suatu negara dengan tujuan untuk menjaga keamanan nasional dan menanggapi ancaman yang berkembang. Beberapa contoh yang dilakukan negara terkait hal tersebut berupa investasi dalam teknologi dan penelitian, pelatihan dan pendidikan, kolaborasi dan aliansi, perencanaan anggaran dan transparansi, penilaian dan analisis, hingga strategi jangka panjang.

#### **4.1.2. Perundingan Pertahanan dan Bisnis Internasional**

Terdapat begitu banyak pendekatan dalam kerjasama internasional, termasuk dalam diplomasi pertahanan, yakni mencakup bilateral, multilateral, trilateral/mini-lateral, regional, hingga global. Dalam pendekatan bilateral sendiri, tujuan dari diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia adalah untuk mengamankan integritas teritorial dan meningkatkan stabilitas regional. Hal-hal yang dilakukan Indonesia seperti melakukan dialog bilateral dan pertukaran militer, pengadaan senjata, adalah upaya Indonesia dalam membangun kepercayaan dan saling pengertian dengan negara sekitar serta berkontribusi terhadap modernisasi di Indonesia.

Dalam hal untuk membangun kerjasama dalam bidang industri pertahanan, termasuk dalam hal bisnis internasional, tentunya juga diperlukan perundingan pertahanan, baik secara bilateral, multilateral, trilateral, dan seterusnya. Dalam perundingan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan

teknologi, penelitian, produksi, pemberantasan terorisme, pengadaan, dan penanganan bencana. Aspek-aspek yang tercakup juga diyakini terlibat dalam faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kerjasama bisnis internasional, seperti yang telah disebutkan dalam tabel 1. Faktor paling utama dari tercapainya suatu kesepakatan kerjasama dari sebuah perundingan adalah kepercayaan. Jika antar negara yang ingin bekerjasama atau berbisnis tidak memiliki rasa saling percaya, maka kerjasama tidak akan terjadi.

#### 4.1.3. Ekspor-Import Peralatan Militer

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif telah membuat kebijakan dan strategi di Indonesia dengan fokus pada internal balancing untuk pengembangan industri dan alutsista dan external balancing untuk pengadaan dengan produsen alutsista non-negara (Yani & Montratama, 2017). Pemangku kebijakan telah memperhitungkan embargo yang pernah dialami Indonesia membangun jalan kemandirian industri pertahanannya sendiri dan tidak bergantung pada satu negara untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perdagangan 2023, hingga pada bulan Mei 2023, impor alutsista Indonesia senilai USD 128,18 juta (naik 28,70% YoY) atau sebanyak 1,16 ribu ton (naik 35,69% YoY). Adapun grafik nilai dan volume impor alutsista yang dilakukan Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1

Nilai dan Volume Impor Alutsista Indonesia 2018-2023

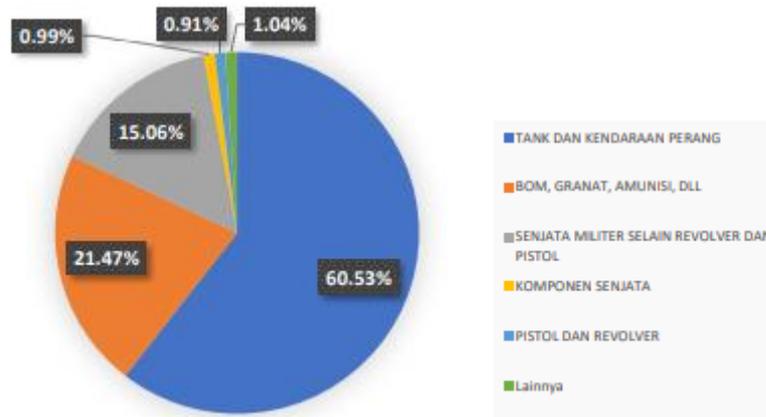


Sumber: Kementerian Perdagangan

( <https://www.kemendagri.go.id/> )

**Gambar 2**

**Presentase Impor Alutsista Indonesia Januari-Mei 2023**



Sumber: Kementerian Perdagangan

( <https://www.kemendagri.go.id/> )

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bagaimana setelah tahun 2020, impor alutsista terus mengalami penurunan hingga menyentuh angka USD 311,21 juta di tahun 2022. Tren ini dapat menjadi penanda bagaimana Indonesia berusaha memperkuat kemandirian industri pertahanannya agar bisa mandiri dan tidak bergantung pada impor. Pengesahan UU Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan juga menjadi bukti nyata yang tak terlepas dari komitmen dan perlahan coba direalisasikan. Melalui UU tersebut, TNI/Polri termasuk Kementerian/Lembaga pemerintah diwajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri. Impor alpalhankam hanya boleh dilakukan jika industri pertahanan dalam negeri belum memproduksinya. Hal ini sekaligus menjadi jawaban atas presentase kenaikan kembali impor alutsista Indonesia di tahun 2023, seperti pada Gambar 2, bahwa Indonesia belum cukup kuat dalam industri tank dan kendaraan perang. Adapun 8 (delapan) BUMN yang bergerak di bidang industri strategis sektor pertahanan adalah PT Pindad (Persero), PAL Indonesia (Persero), Dirgantara Indonesia, Nusantara Turbin dan Propulsi, LEN Industri (Persero), Inti (Persero), Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, dan Danana (Persero).



PT Pindad (Persero) merupakan perusahaan yang diketahui memproduksi berbagai jenis peralatan militer, termasuk tank dan kendaraan perang. Melalui laman websitenya, PT Pindad (Persero) menyebutkan telah memproduksi berbagai kendaraan tempur, seperti Kendaraan Taktis 4x4 Komodo dan Panser 6x6 Anoa dan mengembangkan tank medium bernama "*Harimau Medium Tank*" yang dilengkapi dengan kanon 105 mm (PT Pindad, 2018). Kerjasama ini terjalin antara Indonesia dan Turki serta didukung oleh Kementerian Pertahanan RI. Melalui upaya-upaya seperti ini, Indonesia telah aktif dalam memproduksi peralatan militer, termasuk tank dan kendaraan perang. Melalui kerjasama internasional yang dilakukan Indonesia, kehadiran PT Pindad (Persero) sebagai BUMN, perlahan akan dapat menciptakan kemandirian Indonesia dan bertindak tidak hanya sebagai customer, namun sponsor, hingga regulator.

#### **4.1.4. Stabilitas dan Keamanan Global**

Diplomasi pertahanan juga berperan penting dalam memengaruhi kebijakan kerjasama bisnis internasional dalam industri pertahanan dalam hal stabilitas keamanan global. Beberapa aspek yang mendukung, bahwa diplomasi pertahanan bertujuan untuk menjaga integritas nasional dan stabilitas regional, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi kebijakan kerjasama bisnis internasional dalam industri pertahanan. Diplomasi pertahanan bertugas untuk menciptakan hubungan internasional yang kuat, yang merupakan landasan bagi kerjasama bisnis internasional dalam industri pertahanan. Melalui diplomasi pertahanan, negara-negara dapat membangun kepercayaan dan kerjasama yang diperlukan untuk industri ini. Disamping itu, diplomasi pertahanan juga diwujudkan melalui pelaksanaan kerja sama di bidang pertahanan, yang dapat melibatkan aspek bisnis internasional. Hal ini tentu saja dapat memengaruhi kebijakan dan kerangka kerja sama bisnis antar negara dalam industri pertahanan (Prayoga, 2020). Diplomasi pertahanan saat ini digunakan untuk mengurangi kemungkinan konflik atau kekacauan dan mendukung pertumbuhan hubungan antarnegara dengan menguatkan kapasitas pertahanan untuk mempertahankan peran pentingnya dalam



menjaga stabilitas keamanan internasional. Dorongan ini mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan peranannya dalam forum keamanan regional dan internasional.

Diplomasi pertahanan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan bersama negara mitra, termasuk pertemuan pejabat pertahanan militer dan sipil secara multilateral dan multilateral, penugasan atase pertahanan, perjanjian kerja sama pertahanan, pelatihan aparat pertahanan, rekomendasi strategi pertahanan, pertemuan personil pertahanan militer dan sipil secara multilateral dan multilateral, penugasan aparat pertahanan ke negara mitra, penugasan kelompok pelatih ke negara mitra, penyediaan peralatan pertahanan bagi negara mitra, dan pelaksanaan (Cottey & Foster, 2004). Jika Indonesia dapat memaksimalkan diplomasi pertahanannya, membangun rasa percaya, menjalin berbagai kerjasama, dan menjadi berdikari. Dengan demikian, dampak yang signifikan dari diplomasi pertahanan dapat terlihat dalam membentuk kebijakan dan kerangka kerjasama bisnis internasional dalam industri pertahanan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi stabilitas keamanan global.

#### **4.2. Fungsi Lembaga Internasional dan Organisasi Regional dalam Memfasilitasi Kerjasama Bisnis di Industri Pertahanan**

##### **4.2.1. Lembaga Internasional**

Di tingkat internasional, terdapat beberapa organisasi yang memfasilitasi adanya dialog dan kerjasama antar negara terkait industri pertahanan. Beberapa informasi mengenai lembaga internasional tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut.

**Tabel 2**  
**Lembaga Internasional Terkait Industri Pertahanan**

<b>Nama</b>	<b>Sejarah &amp; Tujuan</b>	<b>Kerjasama Penting</b>
North Atlantic Treaty Organization (NATO)	Perjanjian Washington, yang merupakan dasar NATO, ditandatangani oleh 12 anggota pendiri NATO di Washington, DC pada 4 April 1949. 14 pasal	<ul style="list-style-type: none"><li>● NATO di Kosovo</li><li>● Keamanan maritim</li><li>● Misi penasehatan dan pengembangan kapasitas NATO di</li></ul>



	<p>pendek Perjanjian yang disepakati memungkinkan setiap Sekutu menerapkan teks sesuai keadaan (NATO, 1949).</p>	<p>Irak</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Kerjasama dengan Uni Afrika</li><li>● Kepolisian Udara NATO</li><li>● Dukungan NATO terhadap upaya bantuan gempa di Türkiye (NATO, 2023)</li></ul>
<p>European Defence Agency (EDA)</p>	<p>Dibuat pada 12 Juli 2004 bertujuan untuk mendukung Negara-negara Anggota dan Dewan dalam upaya mereka meningkatkan kemampuan pertahanan Eropa di bidang manajemen krisis dan untuk mempertahankan Keamanan Eropa dan Kebijakan Pertahanan saat ini dan yang akan berkembang di masa depan (EDA, 2024b).</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Inisiatif pertahanan UE</li><li>● Pengembangan Kemampuan</li><li>● Riset &amp; Teknologi</li><li>● Keterlibatan industri</li><li>● Pendanaan UE</li><li>● Kebijakan UE</li><li>● Pelatihan &amp; latihan</li><li>● Dukungan untuk Operasi (EDA, 2024a)</li></ul>
<p>Organisation for Joint Armament Cooperation (OCCAR)</p>	<p>Pengaturan Administratif yang ditandatangani pada 12 November 1996 oleh Menteri Pertahanan Perancis, Jerman, Italia, dan Inggris mendirikan OCCAR pada awalnya. Tujuan OCCAR adalah untuk mendorong negara-negara anggota untuk bekerja sama lebih baik dalam hal persenjataan sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya (OCCAR, 2023b).</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● General Security Agreements (Perjanjian Keamanan Umum)</li><li>● Pengadaan peralatan pertahanan (OCCAR, 2023a).</li></ul>
<p>Defence Procurement International</p>	<p>Defense Procurement International memberikan tinjauan editorial yang jelas</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Sistem Udara, Darat, Laut</li><li>● Amunisi dan</li></ul>

(DPI)	dan tidak memihak mengenai tren akuisisi dan kemajuan teknologi terbaru dalam industri pertahanan global. Informasi ini didistribusikan melalui majalah cetak dan digital, situs web berbasis fitur editorial, dan saluran media sosial yang dibaca oleh personel dalam Kementerian atau Departemen pertahanan, kedutaan besar, lembaga pengadaan, pangkalan militer, kontraktor Tier-1, produsen asli, dan integrator sistem (DPI, 2024a).	Persenjataan <ul style="list-style-type: none"><li>● Prajurit Masa Depan</li><li>● Komunikasi</li><li>● Pertahanan Kimia, Biologi, Radiologi dan Nuklir (Pertahanan CBRN)</li><li>● Teknologi (Elektro-Optik/Infra-Merah)</li><li>● Solusi Perkemahan dan Pangkalan</li><li>● Pelatihan dan Simulasi</li><li>● Logistik Militer (DPI, 2024b)</li></ul>
-------	---	--

#### 4.2.2. Organisasi Regional

Dalam tingkat regional, Indonesia termasuk dalam organisasi Asia Tenggara atau biasa dikenal dengan *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). ASEAN didirikan pada tahun 1967 dengan komitmen untuk mendorong pembangunan sosial-ekonomi dan stabilitas regional di Asia Tenggara. Dalam perjalanannya hingga sekarang, ASEAN telah banyak berkembang serta melahirkan forum-forum dialog. ASEAN Regional Forum (ARF) adalah salah satu forum yang diinisiasi oleh ASEAN pada tahun 1994, yang bertujuan sebagai sarana dialog dan konsultasi terkait isu politik dan keamanan di kawasan. Tujuan utama ARF adalah untuk memfasilitasi pembahasan dan penyelarasan pandangan antara negara-negara peserta ARF, untuk mengurangi ancaman terhadap stabilitas dan keamanan di kawasan.

Dalam kaitannya dengan kerjasama bisnis di industri pertahanan, ARF memiliki peran penting dalam memfasilitasi kerjasama di kawasan Asia Tenggara. ARF merupakan forum dialog multilateral yang terdiri dari 27 negara anggota, mencakup negara anggota ASEAN, negara-negara di kawasan Asia Tenggara, hingga negara-negara di luar kawasan. ARF bertujuan untuk mempromosikan kerjasama dan dialog dalam bidang keamanan dan pertahanan di kawasan Asia Tenggara (Perdana, 2022).



Dalam konteks industri pertahanan, ARF berfungsi untuk mendorong kerjasama pertahanan dengan memfasilitasi kerjasama antara negara-negara anggota dalam bidang pertahanan, termasuk kerjasama dalam pengembangan teknologi pertahanan dan transfer teknologi. Melalui adanya ARF juga mendorong negara-negara anggota untuk meningkatkan transparansi dalam kebijakan pertahanan dan pengeluaran pertahanan, sehingga memudahkan kerjasama bisnis di industri pertahanan.

Selain memiliki ARF, ASEAN juga memiliki ADMM (*ASEAN Defense Minister Meeting*). ADMM adalah forum bagi anggota ASEAN untuk berinteraksi, kerjasama sekaitan menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. ADMM diselenggarakan setiap tahun secara bergantian di negara anggota ASEAN, dan membahas berbagai isu. Pada tahun 2023, Indonesia merupakan tuan rumah *ADMM Meeting* dan telah diselenggarakan pada November 2023, dengan tema *peace, prosperity, and security*. Walaupun tidak secara spesifik membahas bisnis industri pertahanan, melalui ADMM, tiap negara anggota berusaha membangun rasa saling percaya untuk mencapai keamanan kawasan, dan jika rasa saling percaya tumbuh dengan kuat, kerjasama, termaksud bisnis akan berjalan dengan baik.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam cara yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan industri pertahanan Indonesia. Industri pertahanan memerlukan teknologi terbaik untuk mendukung negara yang kuat, dan diplomasi pertahanan diperlukan dalam menunjang hal tersebut. Selain itu, diplomasi pertahanan yang dilakukan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan performa infrastruktur fisik maupun pemberdayaan kapasitas personel yang tergabung dalam industri pertahanan Indonesia. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam tingkat regional maupun internasional. Disamping itu, untuk mencapai industri yang berkembang, pasar adalah faktor lain yang diperlukan; inilah mengapa kerjasama itu penting, dan hal itu juga yang telah dilakukan Indonesia melalui salah satu contoh kerjasama bersama Turki.



Adapun karena keterbatasan waktu dan tenaga, penulis menyadari masih banyak hal yang perlu ditingkatkan dalam hal penulisan ini. Saran yang diberikan bagi penelitian selanjutnya sekiranya dapat mengidentifikasi pola diplomasi pertahanan Indonesia terhadap kerjasama bisnis internasional, serta analisis efektivitas diplomasi pertahanan dalam mendorong kerjasama bisnis internasional dibandingkan diplomasi konvensional.

### Daftar Pustaka

- Assegaf Hamzah & Partners. (2023). Retrieved from <https://www.ahp.id/foreign-direct-investment/>
- Bhwana, P. G. (Ed.). (2024). Retrieved from <https://en.tempo.co/read/1818382/indonesia-needs-strong-defense-system-to-maintain-its-wealth-prabowo-subianto-says-at-presidential-debate>
- BMW Group. (2017). Retrieved from <https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0275763EN/bmw-group-daimler-ag-ford-motor-company-and-the-volkswagen-group-with-audi-and-porsche-form-joint-venture?>
- Chrupała-Pniak, M., Grabowski, D., & Sulimowska-Formowicz, M. (2017). Trust in effective international business cooperation: Mediating effect of work engagement. *Entrepreneurial Business and Economics Review*, 5(2), 27–50. doi:10.15678/eber.2017.050202
- Cottey, A., & Foster, A. (2004). *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. London: Routledge.
- Department of Defense of the United States of America. 2019. *Military and Security's Developments Involving the People's Republic of China*. The United States of America: Office of the Secretary of Defense.



DPI. (2024a). Retrieved from <https://www.defenceprocurementinternational.com/about-us>

DPI. (2024b). Retrieved from <https://www.defenceprocurementinternational.com/company-profiles>

EDA. (2024a). Retrieved from <https://eda.europa.eu/what-we-do>

EDA. (2024b). Retrieved from <https://eda.europa.eu/who-we-are/Missionandfunctions>

Gindarsah, I. (n.d.). Strategic hedging in Indonesia's defense diplomacy. *Defense & Security Analysis*, 32(4), 336-353. 10.1080/14751798.2016.1233695

Gumilar, A. (2018). Analisis Bisnis Internasional di Indonesia. *Jurnal ADBIS*, 2(2), 141–154.

Heidenkamp, H., Louth, J., & Tylor, T. (2013). The Defense Industrial Triptych: Government as Customer, Sponsor, and Regulator. Royal United Services Institute for Defense and Security.

Hidranto, F. (2022). Retrieved from <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4767/defend-id-menuju-peringkat-50-besar-dunia?lang=1>

Holtbrügge, D. (2004). Management of International Strategic Business Cooperation: Situational Conditions, performance criteria, and success factors. *Thunderbird International Business Review*, 46(3), 255–274. doi:10.1002/tie.20008

Inkiriwang, F. W. (2021). 'Garuda shield' vs 'sharp knife': operationalising Indonesia's defence diplomacy. *The Pacific Review*, 34(6), 871-900. 10.1080/09512748.2020.1772352



Jiahe, C. (2022). Retrieved from <https://news.cgtn.com/news/2022-11-23/Opening-of-China-s-financial-market-What-are-its-implications--1faUAcc32V2/index.html>

KADIN. (2024). Retrieved from <https://kadin.id/solusi-bisnis/business-service-desk/>

Kemhan RI. (2022a). Retrieved from <https://www.kemhan.go.id/2022/03/07/membangun-industri-pertahanan-yang-kuat-jadi-kebijakan-utama-kemhan.html>

Kemhan RI. (2022b). Retrieved from <https://www.kemhan.go.id/2022/04/20/menhan-prabowo-dampingi-presiden-jokowi-luncurkan-holding-bumn-indhan-defend-id.html>

Kotler, P., Kartajaya, H., & Huan, H. D. (2015). *Think new ASEAN!: Rethinking marketing towards ASEAN Economic Community*. McGraw Hill Education.

KKIP. (2018a). Retrieved from <https://www.kkip.go.id/tentang-kami/>

KKIP. (2018b). Retrieved from <https://www.kkip.go.id/perusahaan-afiliasi/>

Krishnan, R., & Auklah, P. S. (2022). Institutional Differences and the Value of Identity Bridging Role of Trust in Cross-Border Alliances. In T. K. Das (Ed.), *Managing Interpartner Cooperation in Strategic Alliances* (pp. 91–127). Charlotte, North Carolina: Information Age Publishing.

Kwan, C. H. (2023). Retrieved from <https://cityperspectives.smu.edu.sg/article/balancing-act-how-singapores-policies-reduce-risk-and-control-inflation>

Morano, R. S., Jacomossi, R. R., Barrichello, A., & Feldmann, P. R. (2023). The interdependence between ease of doing business, innovation, and competitiveness of nations. *BAR - Brazilian Administration Review*, 20(2). doi:10.1590/1807-7692bar2023220103



Muthanna, K. (2011). Military Diplomacy. *Journal of Defense Studies*, 5(1).

NATO. (1949). Retrieved from [https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics\\_67656.htm](https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_67656.htm)

NATO. (2023). Retrieved from [https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics\\_52060.htm](https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52060.htm)

OCCAR. (2023a). Retrieved from <https://www.occar.int/our-work>

OCCAR. (2023b). Retrieved from <https://www.occar.int/about-us/history>

Pajtinka, E. (2017). Military Diplomacy and Its Present Function. *Security Dimensions: International & National Studies*, 20(2016), 179-194.

PATTON, S., SATO, J., & LEMAHIEU, H. (2023). 2023 KEY FINDINGS REPORT. ASIA POWER INDEX. <https://power.lowyinstitute.org/>

Perdana, M. H. G. (2022, Juni). MERAWAT PERDAMAIAN MELALUI KEBIJAKAN TRANSPARANSI KINERJA ANTAR ANGGOTA ASEAN DALAM FORUM ADMM-PLUS. *JURNAL SOSIAL DAN HUMANIS SAINS*, 07(01).

Prayoga, A. (2020). Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Membangun Identitas Berbeda di antara Negara- Negara di Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6(3).

Priangani, A.(2015). Perkembangan BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) dalam Kancah Ekonommi Politik Global. *Jurnal Kebangsaan*, 4(7), 35–39.

PT Pindad. (2018, November 13). Harimau Medium Tank. PT. Pindad (Persero). Retrieved January 9, 2024, from <https://pindad.com/medium-tank-pindad>

Samy, M., & Kusumadewi, J. A. (2021). Diplomasi Pertahanan Militer Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Non-Tradisional: Upaya Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia. *Jurnal Hubungan Internasional*, No.1(Tahun XIV), 45-62. <https://e-journal.unair.ac.id/JHI/article/view/25547>



Santosa, B. (2020). Retrieved from <https://voi.id/en/news/2064/>

Schulman, M. (Ed.). (2024). Retrieved from <https://www.weforum.org/publications/the-global-cooperation-barometer-2024/>

Solovev, D. B., Reshetnikova, N. N., & Magomedov, M. G. (2020). Influence Strategic Competitive Advantage International Business Cooperation. In Smart Technologies and Innovations in design for control of technological processes and objects. economy and production (pp. 399–408). Cham, Switzerland: Springer.

Tian, W., & Yu, M. (2022). China's Opening-Up Policies: Achievements and Prospects. *Outward Foreign Direct Investment of Chinese Enterprises*, 201–218. doi:[https://doi.org/10.1007/978-981-19-4719-3\\_8](https://doi.org/10.1007/978-981-19-4719-3_8)

Vistra. (2022). Retrieved from <https://www.vistra.com/insights/why-companies-are-diversifying-china-and-southeast-asia>

Weber, R. N. (2023). Retrieved from <https://www.britannica.com/topic/military-industrial-complex>

Wistiasari, D., & Safitri, Y. A. (2023). Analisis Perspektif Bisnis Internasional pada Apple Inc. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 18620–18625.

Yani, Y. M., & Montratama, I. (2017). Quo Vadis Politik Luar Negeri Indonesia. PT. Elex Media Komputindo.